

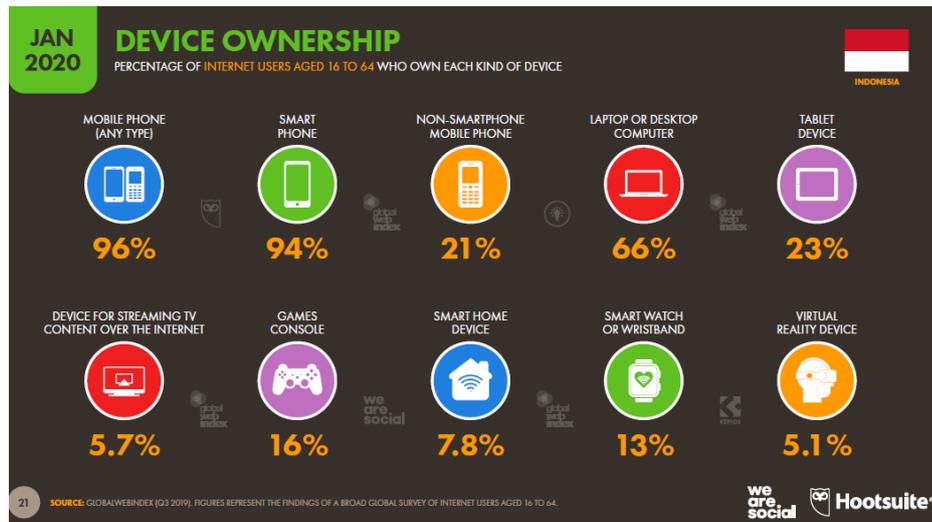
BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Media sosial merupakan salah satu produk kemajuan teknologi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dunia dalam mengakses informasi. Sejatinya, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi antara satu manusia dan manusia lainnya. Di era teknologi informasi perkembangan media sosial sangatlah cepat dan mampu memengaruhi masyarakat khususnya pada komunikasi.

Manusia adalah faktor produksi yang bersifat aktif mengumpulkan modal, mengeksploitasi sumber-sumber daya alam, membangun organisasi-organisasi sosial, ekonomi, politik dan melaksanakan pembangunan nasional. Peningkatan sumber daya manusia dapat dikembangkan dengan tujuan untuk mewujudkan manusia pembangunan yang berbudi luhur, tangguh, cerdas, terampil, mandiri, produktif, kreatif, inovatif, disiplin dan orientasi ke masa depan (Wakerkwa, 2016). Seiring dengan perkembangan zaman, ketergantungan antara individu mulai berkurang. Hal ini dikarenakan teknologi membantu manusia didalam interaksi yang kadang terkendala dengan waktu dan wilayah jangkauan yang sangat luas. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki dampak positif bagi sebuah negara terutama negara berkembang.

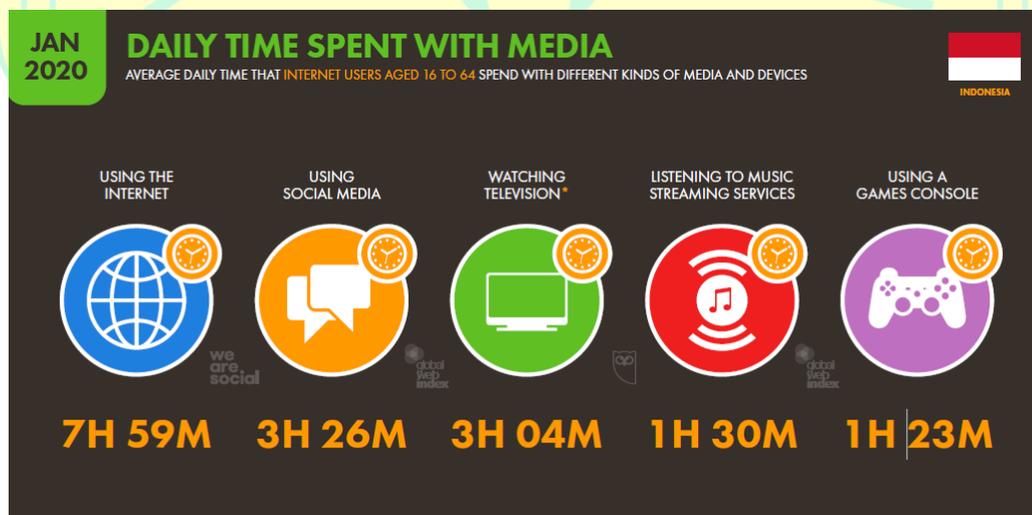
Informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima melalui media sosial. Selain itu, adanya peranan besar masyarakat dalam pengembangan pemerintah memberikan pengaruh terhadap *e-government* yang saat ini lebih aktif dijangkau melalui media sosial. Mobilisasi dari media sosial menjadi sumber daya penting bagi masyarakat untuk menciptakan gerakan sosial (Wiest, 2011). Berkaitan dengan hal itu, di era revolusi industri 4.0 mengharuskan masyarakat mampu untuk menggunakan teknologi informasi bukan hanya sekedar menjadi pengikut tetapi juga belajar dari sebuah informasi. Jadi, kebutuhan kualitas dari sumber informasi di media sosial harus lebih berkualitas.



Gambar 1.1 Pengguna Internet di Indonesia

Sumber: (Hootsuite, 2020)

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan bahwa pengguna internet usia 16 sampai 64 tahun 94% menggunakan *smartphone*, 21% bukan *smartphone mobile phone*, 66% laptop atau PC dan 23% tablet. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia lebih banyak menggunakan *smartphone* dalam mengakses kebutuhan informasi di dunia maya.



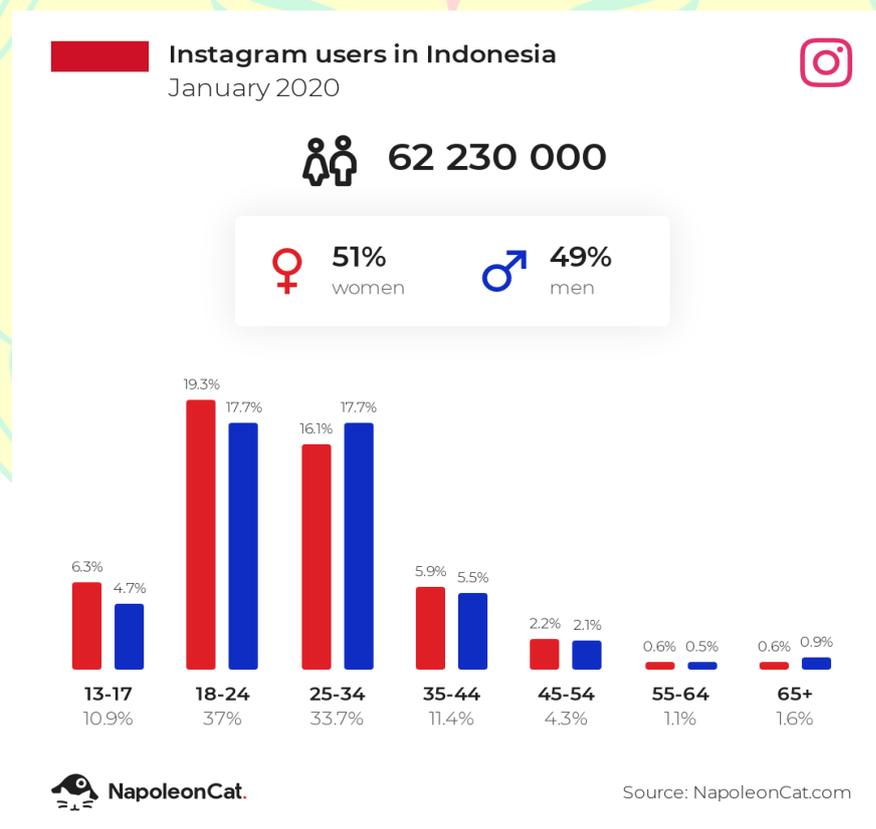
Gambar 1.2 Waktu yang Dhabiskan Pengguna Internet di Indonesia

Sumber: (Hootsuite, 2020)

Gambar 1.2 juga menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia usia 16 sampai 64 tahun, menghabiskan 3 jam 26 menit untuk menggunakan media sosial. perubahan khusus ke media sosial adalah anonimitas agennya, yang berarti

bahwa mereka yang menulis dan berkomentar sering menggunakan nama panggilan atau alias. Meskipun anonimitas memberikan kesempatan untuk mengomentari isu-isu delik, terkadang juga dapat menyebabkan "perang medsos" dan menghindari tanggung jawab. Hal inilah yang membuat individu menjadi pusat digital produksi konten, untuk berbagi pengetahuan, dan pengalaman pribadinya dengan teman-temannya.

Perkembangan dinamis dalam bidang teknologi semakin memudahkan masyarakat khususnya generasi milenial untuk mengakses banyak informasi. Generasi tua dan generasi milenial dapat tersambung dengan adanya teknologi. Di samping itu penelitian ini dilandasi oleh pemikiran bahwa media sosial digunakan oleh banyak orang. Hal tersebut diperkuat oleh data IDN *Research Institute* (2020) yang menyatakan bahwa 93% generasi milenial memiliki akun media sosial dan secara periodik menggunakannya.



Gambar 1.3 Pengguna Instagram di Indonesia 2020

Sumber: (NapoleonCat, 2020)

Di samping itu, Napoleoncat.com juga menunjukkan peningkatan penggunaan instagram di Indonesia bulan November tahun 2019 61.610.000 dan

pada Januari 2020 meningkat 62.230.000. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 620.000 pengguna baru. Menariknya, pengguna perempuan 51% lebih banyak dibandingkan pengguna lelaki yang hanya mencapai 49%. Namun, jumlah penduduk jenis kelamin perempuan tahun 2019 yaitu 133.416.900 dan laki-laki sebesar 134.657.600.

Meskipun jumlah pengguna internet perempuan tinggi dan jumlah penduduk perempuan dibawah laki-laki, tidak serta merta menjamin perempuan untuk memiliki peran dan posisi yang sama dengan laki-laki. Sehingga, kesenjangan tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan pengembangan tata pemerintah yang sensitif gender. Kemudian, memberikan dukungan bagi terciptanya kesetaraan gender di seluruh bidang pembangunan termasuk politik. Sedangkan, menurut Beawiharta (2018) penggunaan internet untuk mengakses media sosial oleh perempuan di Indonesia mencapai 79,92%, kemudian penggunaan ponsel menjadi media yang paling banyak digunakan untuk mengakses internet, yakni mencapai 91,67%. Sementara itu, laptop sebanyak 22,91% dan komputer 16,96%.

Upaya pemerintah dalam mengembangkan kesetaraan gender di bidang politik melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 dengan kebijakan yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. Meningkatkan kinerja dan produktivitas anggota DPR-RI bukanlah hal yang mudah terlebih keterwakilan perempuan belum mencapai kuota 30%, karena hanya ada 20.57% atau sekitar 118 politisi perempuan dari total 575 kursi pada anggota DPR-RI periode 2019-2024 (DPR, 2020). Hal ini juga terjadi pada periode 2014-2019 hanya ada 17.32% atau sebanyak 97 kursi. Meskipun ada peningkatan namun belum mampu mencapai kuota 30%. Masih ada permasalahan terkait dengan minat perempuan dalam dunia politik. Sebagai seorang perempuan, sering kali dipandang sebelah mata. Terlebih masih banyak hak-hak perempuan yang belum setara dan sejahtera. Hal ini dapat berdampak pada penyusunan UU maupun penyerapan aspirasi yang berhubungan dengan perempuan.

Partai politik adalah mesin demokrasi, yang mana kuota 30% perempuan pada kursi legislatif tidak terpenuhi, karena secara kultural dan historis, politisi di

Indonesia didominasi laki-laki. Perempuan yang berkecimpung di dunia politik, perlu mendapatkan wadah yang memadai dari partainya sebagai ruang publik utama dalam pendidikan politik. Perempuan kurang memperoleh pengetahuan politik yang memadai karena terjebak atau cenderung diarahkan pada kerja di sektor domestik dibandingkan kerja di sektor publik.

Pengetahuan politik perempuan yang menjadi anggota legislatif perlu diperkuat agar kinerjanya menjadi berkualitas, setara dengan laki-laki. Partai politik sebagai mesin demokrasi seharusnya menjadi organisasi belajar politik yang utama bagi publik secara umum, dan kadernya secara khusus, termasuk kader perempuan. Lee dkk (2018) menyebutkan bahwa selain ruang publik utama, demokrasi juga memiliki ruang publik alternatif, yaitu media sosial (P. S. N. Lee, So, Lee, Leung, & Chan, 2018).

Media sosial dapat menjadi ruang publik alternatif, karena di ruang sosial maya tersebut terjadi dialog antara pemilik akun media sosial atau yang mengaksesnya untuk saling berdiskusi, menyampaikan pendapat, atau sekedar membagi berbagai informasi termasuk pengetahuan politik mereka. Banyak Politisi menggunakan media sosial untuk menginformasikan aktivitas mereka kepada masyarakat.

Politisi perempuan di kursi legislatif DPR-RI, banyak menggunakan media sosial untuk dapat meningkatkan kinerja baik dalam menampung aspirasi masyarakat di wilayah konstituennya, maupun untuk meningkatkan pengetahuan politiknya. Menurut hasil penelitian Harnoko (2012) selama ini pendidikan politik bagi perempuan tidak pernah diselenggarakan secara sistematis.

Perempuan mengalami depolitisasi yang luar biasa. Hal ini berdampak pada sikap apatis perempuan dan tidak kritis terhadap proses politik. Penggunaan media sosial memiliki keterkaitan dengan revolusi politik karena perkembangan teknologi tersebut berjalan semakin maju dan menghasilkan sebuah rangsangan terhadap gerakan politik (Umar, Darmawan, Sufa, & Ndadari, 2016). Untuk dapat menarik ketertarikan politik dan informasi terkait politik terhadap perempuan, media sosial menjadi jembatan bagi politisi untuk dapat berinteraksi langsung dengan publik sekaligus menjaring pemilih dan memberikan informasi terkait program maupun pendidikan politik (Anshari, 2013).

Hasil studi awal, peneliti menemukan gambaran awal kasus pada beberapa politisi yang menduduki kursi legislatif di DPR, khususnya politisi perempuan dalam memanfaatkan media sosial sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penggunaan Media Sosial oleh Politisi Perempuan DPR RI*

Nama Anggota DPR RI	Partai Asal	Handle Akun Instagram	Jumlah Followers
Dyah Roro Esti	Golkar	@dyahroroestiwp	7.619
Farah Puteri Nahlia	PAN	@farahputerinahlia	5.516
Puteri Komarudin	Golkar	@puterikomarudin	11.700
Hillary Brigitta Lasut	NasDem	@hillarylasut (akun resmi) @hillarybrigitta (akun pribadi)	41.600 58.200
Krisdayanti	PDIP	@krisdayantilemos	4.900.000

Sumber: Instagram.com (2020)

Tabel 1.1 memberikan gambaran bahwa media sosial berperan dalam menjalin komunikasi dan informasi antara anggota DPR dengan konstituen pada khususnya maupun rakyat Indonesia pada umumnya.

Media sosial mempunyai efek ruang gema (*echo chamber*) untuk tujuan tertentu bisa menguatkan atau meruntukan demokrasi ditengah masyarakat. Lee, So, Lee, Leung & Chan (2018) menunjukkan bahwa banyak studi terdahulu yang menemukan bahwa segregasi dan polarisasi pengguna media Online dalam konsumsi media itu hanya satu sisi pada konten yang sesuai dengan pandangan dan kepercayaannya. Orang cenderung memilih konten media yang terkait dengan interest dan kesukaan. Seperti Menu makanan kita bisa memilih yang mana yang kita suka dan yang tidak kita suka.

Seseorang akan memilih atau menyeleksi apa yang dia suka dan tidak suka dari media yang ada. Misalnya seseorang menyukai masakan makan akan mencari media sosial yang menunjang kesukaan tersebut.

Media sosial dapat menjadi ruang publik alternatif yang akan sangat berguna juga dalam membangun organisasi belajar antara politisi dan para konstituen atau pengikut (*follower*) untuk memperoleh pembelajaran (pendidikan), terutama memberikan pendidikan politik. Beberapa akun Instagram tersebut memberikan informasi terkait kegiatan dan program yang dilakukan selama mereka menjabat sebagai Wakil Rakyat.

Media sosial digunakan tidak hanya sebagai media komunikasi antara Wakil Rakyat dan juga masyarakat tetapi dapat menjadi sebagai komunitas belajar untuk memudahkan setiap orang menggunakan fasilitas yang ada didukung dengan akses internet yang memadai. Penggunaan media sosial tersebut dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan kinerja serta produktivitas kerja anggota DPR, khususnya anggota DPR dari kalangan perempuan. Khan & Khan (2019), bahwa penggunaan media sosial mendorong relasi di antara orang-orang dalam organisasi dengan menyediakan sistem manajemen pengetahuan, platform interaksi sosial dan perangkat lunak yang hemat biaya. Media sosial merupakan alat yang mendukung integrasi pengetahuan di antara orang, proses, teknologi dan struktur organisasi, seperti *brainstorming*, manajemen pengetahuan, sistem manajemen dokumen dan sistem pakar (Khan & Khan, 2019).

Revolusi industri 4.0 melalui media sosial seperti *Youtube* memberikan fasilitas terhadap perempuan sebagai seni komunikasi dan media pembelajaran khususnya di bidang politik (Cahyono & Hassani, 2019). Sejalan dengan hasil penelitian Abbott (2011) pada pemilihan umum di Singapura tahun 2011, media sosial digunakan sebagai alat bagi orang-orang yang berkuasa di dalam partai. Hal ini juga dilakukan pemerintahan Malaysia di mana salah satu calon kandidat pemilihan umum menggunakan platform seperti *Facebook* untuk melakukan kampanye *online*. Hanya saja upaya tersebut belum mampu mendukung perempuan untuk terjun dalam dunia politisi. Melalui hasil penelitian Rustiana (2018) topik yang sering diakses di media sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Topik yang Sering Diakses di Media Sosial

Topik Yang Sering dibahas	Jumlah	Presentase
Politik dan Hukum	48	9%
Sosial dan Budaya	75	14%

Pendidikan	75	14%
Ekonomi	69	13%
Dunia Film	146	27%
Kuliner	98	18%
Lainnya	28	5%
	539	100%

Sumber: Rustiana (2018:27)

Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa akses topik politik dan hukum termasuk topik yang rendah dari beberapa topik lainnya yang diakses melalui media sosial. Pendidikan politik merupakan upaya edukatif yang sistematis dalam membentuk individu sadar politik dan mampu menjadi pelaku politik yang dapat bertanggung jawab secara moral dalam mewujudkan tujuan politik itu sendiri. Untuk meningkatkan kualitas, kompetensi, kapabilitas dan kemampuan yang berkualitas sesuai dengan bidang kerja di parlemen, maka pada politisi perempuan dibutuhkan pendidikan politik.

Seperti dipaparkan sebelumnya bahwa media sosial dapat menjadi ruang publik alternatif yang menjadi sarana berbagi pengetahuan antara politisi dan publiknya. Pada titik ini, media sosial menjadi komunitas belajar untuk pendidikan politik kedua belah pihak. Pada akhirnya, kinerja belajar politisi dan konstituen serta pengikutnya berkembang.

Pandangan seperti ini melihat bahwa media sosial dapat memfasilitasi peningkatan kinerja politisi perempuan dengan menggunakan proses yang terjadi pada media sosial. Kajian teknologi pendidikan, menurut *Association for Educational Communications and Technology* (AECT) (2008), merupakan suatu studi dan etika praktik untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan dan mengelola proses teknologi yang sesuai dengan sumber daya. Sudah banyak studi yang melihat bagaimana perempuan menggunakan teknologi untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian dan sikapnya dalam berbagai hal.

Berdasarkan penelitian Rahmawaty (2016) yang mengangkat perempuan dan pemanfaatan teknologi internet dengan pendekatan UTAUT, 68% perempuan menggunakan internet untuk *web browsing*, layanan *e-mail*, dan *Facebook*. Terlebih di era milenial saat ini, masyarakat membutuhkan langkah-langkah dalam

penggunaan teknologi yang baik. Mereka dapat menyeimbangkan pengetahuan dengan bidang pekerjaannya. Sejalan dengan penelitian Jennifer dalam (Barus, 2015) organisasi perempuan dapat memperluas wilayah dan hasil kerja mereka dan memperkuat jaringan melalui media sosial.

Teknologi pendidikan merupakan disiplin ilmu yang mempelajari cara untuk memfasilitasi belajar. Tanpa dipungkiri, perempuan harus diberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan diri khususnya di bidang politik.

Meningkatkan kuota perempuan sebesar 30% bukanlah hal yang mudah. Dalam memfasilitasi belajar, ada beberapa cara yang digunakan salah satunya adalah dengan produk teknologi yang dimanfaatkan secara umum seperti film, program video dan sebagai sarana hiburan, dimanfaatkan dalam dunia pendidikan untuk mendidik atau membelajarkan.

Berdasarkan hasil penelitian Belluati (2020) perempuan dapat memanfaatkan potensi yang ditawarkan oleh Internet dan Web dengan lebih baik untuk mengambil peran yang lebih tajam dalam proses inklusi dan partisipasi demokratis dalam kehidupan publik.

Perempuan menggunakan media sosial Instagram dapat menjadi *learning community* untuk pendidikan politik di masyarakat. Menurut Huang, Spector dan Yang (2019) *learning communities* memberikan dukungan yang diperlukan untuk pembelajaran sosial. Oleh karena itu, politisi perempuan berinteraksi dengan masyarakat melalui media sosial untuk membentuk pemahaman pendidikan politik dan hubungan sosial diantara peserta. Selain itu, media sosial dapat dialihkan menjadi suatu ajang diskusi kelompok untuk kelas maya bagi masyarakat umum (Prawiradilaga, 2012).

Menurut Michael J. Marquardt (1996), organisasi belajar, yaitu (1) belajar dalam organisasi dengan pintar dan kuat; (2) orang yang terlibat di dalam organisasi belajar mulai dari pimpinan, bawahan maupun yang terlibat di dalamnya mempunyai kedewasaan pribadi dan kesehatan mental yang baik dan selalu mau belajar dan bertumbuh Bersama untuk meningkatkan kapasitas diri secara Bersama; (3) Pengorganisasian yang lentur tidak kaku agar mampu mengatasi permasalahan yang pelik dan jatuh bangun; (4) Kreatif dalam menciptakan pengetahuan baru dan dapat menggunakan secara berdaya guna; dan (5) Dapat menggunakan teknologi

kekinian dan memanfaatkannya dalam aktivitas sehari-hari maupun di dalam lingkungannya baik untuk kebutuhan informasi maupun komunikasi.

Beberapa penelitian sebelumnya dapat dijadikan sebuah landasan untuk memberikan gambaran bahwa politisi perempuan juga dapat memberikan perubahan besar pada pendidikan politik melalui media sosial.

Melalui tanggung jawab sebagai anggota legislatif, politisi perempuan berupaya untuk mengedukasi pendidikan politik terhadap masyarakat. Berkaitan dengan teknologi pendidikan Hussien (2020) menyampaikan dalam upaya memfasilitasi pembelajaran khususnya di bidang politik, ruang publik alternatif yang disediakan media sosial Instagram dibuat oleh individu untuk menyuarakan kepeduliannya, memberi informasi, memberi komentar, berbagi dan membuat pengetahuan kepada masyarakat. Berkenaan dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah membuat paradigma baru dalam proses komunikasi dan partisipasi politik.

Memanfaatkan media sosial sebagai peningkatan kinerja politisi perempuan akan menjadi lebih mudah terhubung dengan masyarakat terutama perempuan yang ingin memberikan aspirasi maupun informasi terkait dengan permasalahan yang ada secara cepat. Disamping itu, media sosial telah mengalami mobilisasi pemilih yang mempengaruhi perubahan dinamika kekuasaan dalam lingkungan politik (Ahmad, Mustafa, & Ullah, 2016). Di media sosial, pembangunan dan pemeliharaan jejaring sosial di antara komunitas partai politik menciptakan ruang yang direncanakan untuk persuasi politik (Ahmad, 2020).

Unsur-unsur personalisasi dan emosionalitas memiliki bentuk baru konvensi visual yang berbeda menjadi alat persuasi politik dalam media digital (Amit-Danhi & Shifman, 2018). Penggunaan media sosial dan persuasi memberikan hasil yang jelas. Selain itu, penggunaan dan intensitas media sosial telah terbukti dapat memprediksi ekspresi politik online (Diehl, Weeks, & Gil de Zúñiga, 2016). Selain itu, ekspresi politik berbasis media sosial telah menjadi pendahulu dari partisipasi politik.

Demikian pula, para politisi menggunakan blog untuk persuasi politik terhadap pemilih. Dalam kampanye pemilu, teknologi media sosial telah menjadi semakin signifikan untuk persuasi dan komunikasi politik (Gil de Zúñiga,

Molyneux, & Zheng, 2014). Selain itu, non-pemilih dapat dimobilisasi untuk memberikan suara jika mereka menerima informasi politik dari para politisi seperti artis idola mereka di situs media sosial, yang merupakan indikasi tentang pengaruh persuasi politik (Skoric, Zhu, & Pang, 2016).

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa media sosial merupakan sarana partai politik sebagai organisasi belajar bagi politisi perempuan dan publiknya melalui peningkatan kinerja politiknya. Tanpa disadari media sosial bisa menjadi efek ruang gema yang bertujuan untuk menguatkan sekaligus meruntuhkan demokrasi.

Sejalan dengan pemikiran Smith (2001) organisasi belajar merupakan organisasi di mana orang mengembangkan kapasitas mereka secara terus menerus untuk menciptakan hasil yang diinginkan. Penelitian bertujuan menganalisis bagaimana media sosial sebagai wahana belajar dan membangun organisasi belajar, terutama yang terkait dengan pendidikan politik. Di samping kebutuhan individual, politisi perempuan anggota DPR-RI periode 2019-2024 memiliki tantangan yang besar terkait media sosial sebagai organisasi belajar untuk pendidikan politik.

Penelitian ini berangkat dari konsep organisasi belajar yang diungkapkan oleh Marquadt bahwa Organisasi belajar adanya kerja sama yang aktif antara semua elemen yang terlibat di dalamnya, baik pimpinan bawahan dan orang-orang di sekitarnya. Mereka bekerja sama dan berkembang secara bersama baik pada diri pribadi maupun berkembang dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

Media sosial yang digunakan oleh politisi perempuan untuk meningkatkan pengetahuan politiknya dalam konteks masyarakat demokratis belum dilihat secara sistemik sebagai bagian dalam pendidikan politik politisi dan publiknya. Media sosial hanya dilihat sebagai sarana komunikasi dan pembangunan citra politisi, meski penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dapat dilihat sebagai organisasi belajar yang mampu memengaruhi peningkatan pengetahuan politik, keterbukaan informasi dan sharing pengetahuan antara politisi dengan publiknya atau antar publik.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berusaha untuk mengetahui peran anggota DPR-RI, terutama politisi perempuan dalam menggunakan media sosial untuk membangun komunikasi politik dengan konstituen pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya. Hal yang lebih khusus lagi adalah proses dan

konten pendidikan politik apa saja yang dibangun oleh politisi perempuan anggota DPR-RI melalui media sosial tersebut.

1.2. Pembatasan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dijabarkan di atas, penelitian ini memberikan fokus penelitian pada bagaimana **Media Sosial sebagai Sarana Pendidikan Politik Politisi Perempuan Menjadi Organisasi Belajar**. Politisi Perempuan DPR-RI yang dimaksud dalam penelitian ini dibatasi pada anggota DPR-RI yang terpilih pada periode 2019-2024 yang mewakili golongan perempuan dari berbagai wakil partai politik yang berhasil lolos. Adapun pemanfaatan media sosial dibatasi pada jenis media sosial yang dimanfaatkan oleh para politisi perempuan anggota DPR-RI dalam membangun komunikasi politik dengan konstituennya. Organisasi belajar yang dimaksud dalam penelitian ini juga dibatasi sebagai pola komunikasi yang terorganisasi antara anggota DPR-RI dari wakil perempuan dalam menjalin komunikasi, informasi dan edukasi dengan para konstituen yang memilihnya. Penelitian ini juga membatasi pendidikan politik sebagai proses dan isi pendidikan politik yang terjadi dan diberikan oleh anggota DPR-RI wakil perempuan dalam organisasi belajar yang dibangunnya melalui media sosial yang dipergunakan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana politisi perempuan menggunakan media sosial untuk sarana kegiatan pengelolaan pengetahuan politiknya sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024?”

1.4. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan data penggunaan media sosial oleh Politisi Perempuan DPR RI Periode 2019-2024
2. Mendeskripsikan kegiatan pengelolaan pengetahuan politik oleh politisi perempuan anggota DPR RI 2019-2024 melalui akun media sosialnya sebagai sarana pendidikan politik

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dan berkontribusi dalam hal:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara teoritik Penggunaan media sosial sebagai sarana untuk Pendidikan Politik menjadi organisasi belajar . Konstruksi teori ini akan memberikan dampak terhadap pengembangan perangkat teknologi pendidikan, khususnya dalam memanfaatkan teknologi media masa untuk memberikan pendidikan politik melalui berbagai bentuk organisasi belajar.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat praktis bagi kalangan politisi DPR-RI maupun DPR di tingkat daerah dalam praktik baik (*best practice*) untuk memberikan pendidikan politik pada konstituen untuk menjadi organisasi belajar melalui media sosial.

1.6. State of The Art

Untuk menunjukkan bahwa penelitian ini merupakan kebaruan dari penelitian yang dilakukan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yaitu:

1. Bailey, dan Nawara (2019) dalam penelitiannya yang berjudul *Addressing Women and Minorities on Social Media by the 2016 U.S. Presidential Candidates*. menunjukkan bahwa kampanye secara sadar menargetkan postingan tentang wanita dan minoritas berdasarkan pola penggunaan media sosial. Saat pemilihan presiden di Amerika tahun 2016, Clinton lebih cenderung memposting tentang masalah wanita ke Facebook dan Instagram, yang lebih mungkin digunakan oleh wanita daripada twitter. Demikian pula, Clinton lebih cenderung memposting tentang imigrasi ke Facebook dan Instagram. Meskipun orang Afrika-Amerika lebih cenderung menggunakan Twitter daripada orang kulit putih, Clinton tidak secara signifikan melakukan tweet tentang ras. Dengan demikian, media sosial tidak hanya berdampak bagi warga yang mengikuti kandidat di Facebook, Twitter dan Instagram, tetapi juga berdampak pada semua orang karena apa yang dilakukan kandidat di media sosial diliput dan disajikan kepada publik oleh

media tradisional. Disamping itu, postingan yang dilakukan Clinton mendapatkan respon positif sebesar 54%. Ini berarti bahwa postingannya tentang masalah wanita, sebesar 65% nya selalu positif, secara signifikan lebih positif daripada postingan biasanya.

2. Lee, dan Xenos (2019) melakukan penelitian terkait *Social Distraction? Social Media sse Abd Political Knowledge in Two U.S. Presidential Elections*. Berdasarkan data survei dari dua pemilihan presiden AS baru-baru ini, kami menemukan bahwa penggunaan politik Facevook tidak membantu pengguna tetap mengetahui informasi tentang politik. Secara keseluruhan, hasil analisis cross-sectional dan panel memberikan kesimpulan yang sama. Keduanya menunjukkan bahwa penggunaan media sosial politik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengetahuan politik, sedangkan penggunaan media sosial secara umum memiliki pengaruh yang cukup negatif terhadap pengetahuan politik. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang peran penggunaan media sosial dalam pembelajaran politik.
3. Goodyear, Parker dan Casey (2019) melalui penelitiannya *Social Media and Teacher Professional Learning Communities* menjelaskan bahwa dari 901 tweet antara 100 peserta; dan 18 wawancara mendalam semi-terstruktur dengan peserta dan moderator komunitas pembelajaran profesional berbasis twitter, dua tema dilaporkan menjelaskan sifat komunitas pembelajaran profesional. Berbagai jenis karakteristik #pechat yang mengembangkan pembelajaran dan praktik berkaitan dengan keterlibatan peserta menunjukkan bagaimana #pechatengaged dengan diskusi yang berbeda dan bagaimana moderator memainkan peran kunci dalam memfasilitasi diskusi di antara peserta. Praktik kedua menunjukkan bagaimana diskusi antara peserta #pechat mengarah pada pengembangan praktik baru yang dapat digunakan oleh beberapa fasilitator untuk mencapai tujuan tertentu dalam pelajaran pendidikan jasmani mereka. Pelatihan fasilitator atau moderator dapat mendukung pengembangan PLC berbasis media sosial yang berdampak positif dan positif pada praktik guru.

4. Adi, Gerodimos, dan Lilleker (2018) yang berjudul *Yes We Vote: Civic Mobilisation and Implusive Engagement on Instagram*. Hasil penelitian tersebut menggambarkan mobilisasi warga sipil atau pemilih Rumania di Instagram selama putaran ke-2 pemilihan presiden 2014. Terjadi gerakan impulsif jangka pendek yang terbentuk di sekitar tiga tagar melalui Instagram. Unsur dan emosi tertentu (solidaritas, kebanggaan, kebahagiaan dan ketekunan) dijadikan sebagai tagar. Namun, tidak ada hierarki, struktur, aturan atau pemimpin yang terlihat dalam gerakan ini. Karena melalui media sosial Instagram satu-satunya norma yang muncul terkait dengan platform, seperti pengambilan foto objek dan aktivitas dengan cara yang mirip dengan pengguna lain agar sesuai dengan norma gerakan yang sedang dibangun. Isu utama yang menjadi inti dari fenomena ini adalah hak untuk memilih - baik karena kendala dan keterlambatan yang dihadapi diaspora atau sebagai sarana ekspresi kehadiran sipil dan rasa syukuran atas hukuman Iohannis yang dipandang sebagai tanda era baru untuk Rumania. Instagram dalam hal ini muncul sebagai ranah publik semu yang menyatukan komunitas diaspora dan domestik untuk melakukan protes terhadap pemerintah. Menariknya peristiwa politik besar atau gerakan sosial - betapapun singkatnya saat menggunakan media sosial seperti Instagram dapat memiliki efek jangka panjang yang berpotensi signifikan pada sosialisasi dan keterlibatan politik.

Berdasarkan hasil penelitian diatas belum ada penelitian tentang organisasi belajar pada pendidikan politik melalui media sosial khususnya terhadap politisi perempuan. Perempuan dalam DPR walau bukan gender dominan tapi tidak dapat dikesampingkan dalam kontribusinya khususnya menyalurkan aspirasi dari perempuan Indonesia. Adapun salah satu wujud mengimplementasikan tugas dan wewenang politisi anggota DPR-RI terkait publikasi mengenai pendidikan politik pada masyarakat. Politisi perempuan menjadi salah satu hal vital karena dalam DPR karena menjadi salah perwakilan perempuan di Indonesia pada DPR. Latar belakang teknologi pendidikan peneliti maka fokus penelitian ini adalah Media Sosial sebagai Sarana Pendidikan Politik Politisi Perempuan Menjadi Organisasi Belajar